

## MATRIKS PERBANDINGAN

### Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH, KEHILANGAN, PEMBATALAN, DAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH, KEHILANGAN, PEMBATALAN, DAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
<p style="text-align: center;">Menimbang :</p> <p>bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22, Pasal 30, dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia;</p>	<p style="text-align: center;">Menimbang :</p> <p>a. bahwa negara menjamin perlindungan hak status kewarganegaraan bagi setiap orang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pemberian kewarganegaraan Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara kepada anak yang belum mendaftar atau sudah mendaftar tetapi belum memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, serta untuk menyempurnakan tata cara pelaporan kehilangan dan memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia bagi Warga Negara Indonesia, dan memperkuat basis data Pewarganegaraan, perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan</p>

	atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia;
<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 5 ayat (2) Undnag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);</li> </ol>	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);</li> </ol>
<p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH, KEHILANGAN, PEMBATALAN, DAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH, KEHILANGAN, PEMBATALAN, DAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.</p>
	<p>Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676) diubah sebagai berikut:</p>
<p>BAB I</p> <p>KETENTUAN UMUM</p>	
<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh</li> </ol>	

<p>Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Republik Indonesia.</li> <li>3. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia.</li> <li>4. Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia.</li> <li>5. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Konsulat Republik Indonesia, atau Perutusan Tetap Republik Indonesia.</li> <li>6. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.</li> </ol>	
<p><b>BAB II</b> <b>PEWARGANEGARAAN</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Orang Asing yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang dapat mengajukan permohonan Pewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri.</p>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :</li> </ol>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nama lengkap;</li> <li>b. tempat dan tanggal lahir;</li> <li>c. jenis kelamin;</li> <li>d. status perkawinan;</li> <li>e. alamat tempat tinggal;</li> <li>f. pekerjaan; dan</li> <li>g. kewarganegaraan asal.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup dan paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nama lengkap;</li> <li>b. tempat dan tanggal lahir;</li> <li>c. jenis kelamin;</li> <li>d. status perkawinan;</li> <li>e. alamat tempat tinggal;</li> <li>f. pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap;</li> <li>g. kewarganegaraan asal; dan</li> </ol>

<p>(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh Pejabat;</li> <li>b. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah, kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian, atau kutipan akte kematian isteri/suami pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang disahkan oleh Pejabat;</li> <li>c. surat keterangan keimigrasian yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon yang menyatakan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;</li> <li>d. fotokopi kartu izin tinggal tetap yang disahkan oleh Pejabat;</li> <li>e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit;</li> <li>f. surat pernyataan pemohon dapat berbahasa Indonesia;</li> <li>g. surat pernyataan pemohon mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>h. surat keterangan catatan kepolisian yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon;</li> <li>i. surat keterangan dari perwakilan negara pemohon bahwa dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;</li> <li>j. surat keterangan dari camat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon bahwa pemohon memiliki pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap;</li> <li>k. bukti pembayaran uang Pewarganegaraan dan biaya permohonan ke kas negara; dan</li> <li>l. pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4X6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.</li> </ol> <p>(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampirannya</p>	<p>h. nomor induk kependudukan.</p> <p>(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. fotokopi kutipan akta kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;</li> <li>b. fotokopi kutipan akta perkawinan/ buku nikah, kutipan akta perceraian, atau kutipan akta kematian istri/suami pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan sudah kawin yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;</li> <li>c. surat keterangan keimigrasian yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon yang menyatakan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;</li> <li>d. fotokopi kartu tanda penduduk;</li> <li>e. fotokopi kartu izin tinggal tetap yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;</li> <li>f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit;</li> <li>g. surat pernyataan pemohon dapat berbahasa Indonesia;</li> <li>h. surat pernyataan pemohon mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>i. surat keterangan catatan kepolisian;</li> <li>j. surat keterangan dari perwakilan negara pemohon bahwa dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;</li> <li>k. surat keterangan dari camat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon bahwa pemohon memiliki pekerjaan dan/ atau berpenghasilan tetap;</li> <li>l. bukti pembayaran uang Pewarganegaraan sebagai penerimaan negara bukan pajak; dan</li> <li>m. pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4X6 (empat kali</li> </ol>
---	--

<p>disampaikan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.</p>	<p>enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.  (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampirannya disampaikan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.</p>
	<p>2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Pejabat melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif permohonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.  (2) Dalam hal persyaratan administratif permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap, Pejabat melakukan pemeriksaan substantif permohonan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.  (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi persyaratan substantif, Pejabat mengembalikannya kepada pemohon dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan substantif selesai dilakukan.  (4) Dalam hal permohonan telah dinyatakan memenuhi persyaratan substantif, Pejabat meneruskan permohonan kepada Menteri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan substantif selesai dilakukan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3A</p> <p>(1) Bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang yang:  a. belum mendaftar; atau  b. sudah mendaftar tetapi belum memilih kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang, dapat mengajukan permohonan Pewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri.  (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup dan paling sedikit memuat:  a. nama lengkap;  b. tempat dan tanggal lahir;  c. jenis kelamin;  d. status perkawinan;  e. alamat tempat tinggal;  f. pekerjaan dan/ atau berpenghasilan tetap;  g. kewarganegarazrn asal; dan  h. nomor induk kependudukan atau nomor identitas tunggal.  (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan:  a. fotokopi kutipan akta kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;  b. fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian, atau kutipan akta kematian istri/ suami pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan sudah kawin yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;</p>

	<ul style="list-style-type: none"><li>c. fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian, atau kutipan akta kematian salah seorang dari orang tua pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;</li><li>d. surat keterangan keimigrasian yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon yang menyatakan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;</li><li>e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit;</li><li>f. surat pernyataan pemohon dapat berbahasa Indonesia;</li><li>g. surat pernyataan pemohon mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li><li>h. surat keterangan catatan kepolisian;</li><li>i. surat keterangan dari perwakilan negara pemohon bahwa dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;</li><li>j. surat keterangan dari camat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon bahwa pemohon memiliki pekerjaan dan/ atau berpenghasilan tetap;</li><li>k. bukti pembayaran uang Pewarganegaraan sebagai penerimaan negara bukan pajak; dan 1. pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4X6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.</li></ul> <p>(4) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lahir di wilayah negara Republik Indonesia dan tidak memiliki persyaratan surat keterangan keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, pemohon harus melampirkan biodata penduduk yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil.</p> <p>(5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampirannya disampaikan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.</p>
--	---

	3. Ketentuan Pasal 5 tetap dan penjelasan Pasal 5 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Menteri melakukan pemeriksaan substantif dan meneruskan permohonan disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima dari Pejabat.</p> <p>(2) Dalam hal diperlukan, Menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.</p> <p>(3) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima.</p> <p>(4) Apabila pertimbangan tidak diberikan kepada Menteri dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), instansi terkait dianggap tidak berkeberatan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Presiden mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima dari Menteri.</p> <p>(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Presiden menetapkan Keputusan Presiden dan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan tembusan kepada Pejabat dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Presiden ditetapkan.</p> <p>(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petikannya disampaikan kepada Pejabat untuk diteruskan kepada pemohon dan salinannya disampaikan kepada Menteri, Pejabat, dan perwakilan negara asal pemohon.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Pejabat memanggil pemohon secara tertulis untuk mengucapkan sumpah</p>	

<p>atau menyatakan janji setia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan petikan Keputusan Presiden dikirim kepada pemohon.</p> <p>(2) Dalam hal pemohon memenuhi panggilan dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan Pejabat dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.</p> <p>(3) Dalam hal pemohon tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang sah, pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dapat dilakukan di hadapan Pejabat dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) Pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dalam 4 (empat) rangkap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rangkap pertama untuk pemohon;</li> <li>b. rangkap kedua disampaikan kepada Menteri;</li> <li>c. rangkap ketiga disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara; dan</li> <li>d. rangkap keempat disimpan oleh Pejabat.</li> </ol> <p>(5) Berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disampaikan kepada pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Dalam hal pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara tertulis oleh Pejabat untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Keputusan Presiden batal demi hukum.</p> <p>(2) Pejabat melaporkan Keputusan Presiden yang batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dengan melampirkan petikan Keputusan Presiden yang bersangkutan.</p>	



<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Apabila pemohon dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia sebagai akibat kelalaian Pejabat, pemohon dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan Pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.</p> <p>(2) Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal menerima laporan mengenai kelalaian Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk pejabat lain untuk mengambil sumpah atau pernyataan janji setia pemohon.</p> <p>(3) Pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penunjukannya memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib mengembalikan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.</p> <p>(2) Dalam hal anak-anak pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin ikut memperoleh status kewarganegaraan pemohon, dokumen atau surat-surat keimigrasian atas nama anak-anak pemohon wajib dikembalikan kepada kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditolak, Presiden memberitahukan kepada Menteri.</p> <p>(2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan dan diberitahukan secara tertulis oleh Menteri kepada pemohon dengan tembusan kepada Pejabat dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri.</p>	

	4. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 12A dan Pasal 12B sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.</p> <p>(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia diterima oleh Menteri.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12A</p> <p>Ketentuan mengenai tata cara permohonan Pewarganegaraan bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pewarganegaraan bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A.</p>
<p style="text-align: center;"><b>BAB III</b> <b>TATA CARA PEMBERIAN KEWARGANEGARAAN</b> <b>KEPADA ORANG ASING YANG BERJASA KEPADA</b> <b>NEGARA REPUBLIK INDONESIA ATAU DENGAN</b> <b>ALASAN KEPENTINGAN NEGARA</b></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12B</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A diatur dengan Peraturan Menteri.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Presiden dapat memberikan Kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Orang Asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.</p> <p>(2) Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Orang Asing yang karena prestasinya luar biasa di bidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup, atau keolahragaan telah memberikan kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Presiden dapat memberi Kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Orang Asing karena alasan kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.</p> <p>(2) Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat</p>	

<p>(1) diberikan kepada Orang Asing yang dinilai oleh negara telah dan dapat memberikan sumbangan yang luar biasa untuk kepentingan memantapkan kedaulatan negara dan meningkatkan kemajuan khususnya di bidang perekonomian Indonesia.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Usul pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diajukan kepada Menteri oleh pimpinan lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga kemasyarakatan terkait.</p> <p>(2) Usul pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan kepada Menteri oleh pimpinan lembaga negara atau lembaga pemerintah terkait dengan tembusan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang diusulkan.</p> <p>(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup yang dilampiri dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. fotokopi akte kelahiran;</li><li>b. daftar riwayat hidup;</li><li>c. surat pernyataan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li><li>d. surat pernyataan bersedia menjadi Warga Negara Indonesia dan melepaskan kewarganegaraan asalnya;</li><li>e. fotokopi paspor atau surat yang bersifat paspor yang masih berlaku;</li><li>f. surat keterangan dari perwakilan negara Orang Asing yang diusulkan bahwa yang bersangkutan akan kehilangan kewarganegaraan yang dimilikinya setelah memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;</li><li>g. surat rekomendasi yang berisi pertimbangan bahwa Orang Asing yang diusulkan layak untuk diberikan kewarganegaraan</li></ul>	

<p>karena jasanya atau alasan kepentingan negara; dan</p> <p>h. pas foto terbaru berwarna ukuran 4X6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Menteri memeriksa persyaratan substantif pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.</p> <p>(2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri meneruskan usul pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia disertai dengan pertimbangan kepada Presiden.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Presiden menyampaikan usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk memperoleh pertimbangan.</p> <p>(2) Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p>(3) Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan Keputusan Presiden mengenai pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia.</p> <p>(4) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3), petikannya disampaikan kepada Menteri untuk diteruskan kepada Orang Asing yang bersangkutan melalui Pejabat dan salinannya disampaikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;</li> <li>b. Lembaga pengusul;</li> <li>c. Menteri;</li> <li>d. Perwakilan negara asal Orang Asing yang bersangkutan; dan</li> <li>e. Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Pejabat memanggil Orang Asing yang bersangkutan secara tertulis untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan petikan</p>	

<p>Keputusan Presiden dikirim kepada Orang Asing yang bersangkutan.</p> <p>(2) Dalam hal Orang Asing yang bersangkutan memenuhi panggilan dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Orang Asing yang bersangkutan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan Pejabat dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.</p> <p>(3) Dalam hal Orang Asing yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang sah, pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dapat dilakukan di hadapan Pejabat dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) Pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dalam 4 (empat) rangkap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rangkap pertama untuk Orang Asing yang bersangkutan;</li> <li>b. rangkap kedua disampaikan kepada Menteri;</li> <li>c. rangkap ketiga disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara; dan</li> <li>d. rangkap keempat disimpan oleh Pejabat.</li> </ol> <p>(5) Berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disampaikan kepada Orang Asing yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Dalam hal Orang Asing yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara tertulis oleh Pejabat untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Keputusan Presiden batal demi hukum.</p> <p>(2) Pejabat melaporkan Keputusan Presiden yang batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dengan</p>	

melampirkan petikan Keputusan Presiden yang bersangkutan.	
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Apabila Orang Asing yang bersangkutan dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia sebagai akibat kelalaian Pejabat, Orang Asing yang bersangkutan dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan Pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.</p> <p>(2) Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal menerima laporan mengenai kelalaian Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk pejabat lain untuk mengambil sumpah atau pernyataan janji setia Orang Asing yang bersangkutan.</p> <p>(3) Pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penunjukannya memanggil Orang Asing yang bersangkutan untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, Orang Asing yang bersangkutan wajib mengembalikan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.</p> <p>(2) Dalam hal anak-anak Orang Asing yang bersangkutan yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin ikut memperoleh status kewarganegaraan Orang Asing yang bersangkutan, dokumen atau surat-surat keimigrasian atas nama anak-anak Orang Asing yang bersangkutan wajib dikembalikan kepada kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditolak, Presiden memberitahukan secara tertulis kepada Menteri disertai</p>	

<p>alasannya.</p> <p>(2) Penolakan serta alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Menteri kepada pimpinan lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga kemasyarakatan terkait.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Menteri mengumumkan nama Orang Asing yang diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.</p> <p>(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia diterima oleh Menteri.</p>	
<p><b>BAB IV</b></p> <p><b>TATA CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN</b></p> <p><b>REPUBLIK INDONESIA BAGI ANAK ANGKAT</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Untuk memperoleh kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, orang tua angkat dari anak yang diangkat mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.</p> <p>(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nama lengkap orang tua angkat;</li> <li>b. tempat dan tanggal lahir;</li> <li>c. alamat tempat tinggal;</li> <li>d. pekerjaan;</li> <li>e. status perkawinan orang tua;</li> <li>f. nama lengkap anak angkat;</li> </ol>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>g. tempat dan tanggal lahir anak;</li> <li>h. jenis kelamin anak; dan</li> <li>i. kewarganegaraan asal anak.</li> </ul> <p>(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat keterangan kelahiran anak yang diangkat yang disahkan oleh Pejabat;</li> <li>b. izin keimigrasian bagi anak yang bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia;</li> <li>c. surat keterangan tempat tinggal anak dari camat bagi anak yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia;</li> <li>d. fotokopi paspor anak yang masih berlaku;</li> <li>e. penetapan pengadilan negeri tentang pengangkatan anak;</li> <li>f. surat keterangan dari perwakilan negara anak bahwa tidak keberatan anak yang bersangkutan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;</li> <li>g. fotokopi kutipan akte kelahiran orang tua yang mengangkat anak yang disahkan oleh Pejabat;</li> <li>h. fotokopi paspor atau kartu tanda penduduk orang tua yang mengangkat anak yang disahkan oleh Pejabat;</li> <li>i. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah, kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian, atau kutipan akte kematian salah satu orang tua yang mengangkat anak yang disahkan oleh Pejabat; dan</li> <li>j. pasfoto anak terbaru berwarna ukuran 4X6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.</li> </ul>	
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Pejabat memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) terhitung sejak tanggal permohonan diterima.</p> <p>(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 belum lengkap, Pejabat mengembalikan permohonan kepada pemohon dalam</p>	



<p>waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima untuk dilengkapi.</p> <p>(3) Dalam hal permohonan telah lengkap, Pejabat menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Menteri memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterima dari Pejabat.</p> <p>(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Menteri mengembalikan permohonan kepada Pejabat dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan dari Pejabat untuk dilengkapi.</p> <p>(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap, Menteri menetapkan keputusan mengenai perolehan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak angkat.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Keputusan Menteri mengenai perolehan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), disampaikan kepada Pejabat dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal ditetapkan dan salinannya disampaikan kepada Pejabat dan perwakilan negara asal pemohon.</p> <p>(2) Pejabat menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri diterima.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Dalam hal perolehan Kewarganegaraan Republik Indonesia mengakibatkan anak angkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berkewarganegaraan ganda, berlaku ketentuan Pasal 6 Undang-Undang.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>Menteri mengumumkan nama anak angkat yang memperoleh</p>	

Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dalam Berita Negara Republik Indonesia.	
<p style="text-align: center;"><b>BAB V</b>  <b>TATA CARA KEHILANGAN, PEMBATALAN,</b>  <b>MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK</b>  <b>INDONESIA DAN MENYAMPAIKAN PERNYATAAN</b>  <b>INGIN TETAP MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Bagian Pertama</b>  <b>Tata Cara Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia</b></p>	
	5. Ketentuan Pasal 31 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) dan penjelasan Pasal 31 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 31</b></p> <p>(1) Warga Negara Indonesia dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraannya karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;</li> <li>b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;</li> <li>c. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;</li> <li>d. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;</li> <li>e. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;</li> <li>f. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;</li> <li>g. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 31</b></p> <p>(1) Warga Negara Indonesia dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraannya karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;</li> <li>b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;</li> <li>c. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;</li> <li>d. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat ddabat oleh Warga Negara Indonesia;</li> <li>e. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;</li> <li>f. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;</li> <li>g. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas</li> </ol>

<p>namanya; atau</p> <p>h. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.</p> <p>(2) Warga Negara Indonesia dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri apabila yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.</p>	<p>namanya; atau</p> <p>h. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.</p> <p>(2) Warga Negara Indonesia dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri apabila yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.</p> <p>(3) Permohonan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p>	<p>6. Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Pimpinan instansi tingkat pusat yang mengetahui adanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) mengkoordinasikan kepada Menteri.</p> <p>(2) Pimpinan instansi tingkat daerah atau anggota masyarakat yang mengetahui adanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Pimpinan instansi tingkat pusat yang mengetahui adanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) mengkoordinasikan kepada Menteri.</p> <p>(2) Pimpinan instansi tingkat daerah atau anggota masyarakat yang mengetahui adanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana</p>

<p>dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) melaporkan secara tertulis kepada Pejabat.</p> <p>(3) Anggota masyarakat yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia yang mengetahui adanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) melaporkan secara tertulis kepada Perwakilan Republik Indonesia.</p>	<p>dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) melaporkan secara tertulis kepada Pejabat.</p> <p>(3) Anggota masyarakat yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia yang mengetahui adanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) melaporkan secara tertulis kepada Perwakilan Republik Indonesia.</p> <p>(4) Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia melaporkan dirinya kepada Perwakilan Republik Indonesia.</p> <p>(5) Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan bertempat tinggal di dalam wilayah negara Republik Indonesia melaporkan dirinya kepada Menteri melalui Pejabat.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nama lengkap, alamat pelapor dan terlapor; dan</li> <li>b. alasan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia terlapor.</li> </ol> <p>(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampiri antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. fotokopi Surat Perjalanan Republik Indonesia atas nama yang bersangkutan; dan</li> <li>b. fotokopi paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Sebagai tindak lanjut hasil koordinasi dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Menteri memeriksa kebenaran laporan tentang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia.</p>	

<p>(2) Untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan klarifikasi kepada pelapor, terlapor, dan instansi terkait.</p> <p>(3) Dalam hal hasil pemeriksaan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Menteri menetapkan Keputusan Menteri tentang nama orang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia.</p> <p>(4) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tembusannya disampaikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Presiden;</li> <li>b. Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang yang kehilangan kewarganegaraan;</li> <li>c. Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang yang kehilangan kewarganegaraan; dan</li> <li>d. instansi terkait.</li> </ol>	
	<p>7. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Permohonan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) diajukan secara tertulis oleh yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri.</p> <p>(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nama lengkap;</li> <li>b. tempat dan tanggal lahir;</li> <li>c. alamat tempat tinggal;</li> <li>d. pekerjaan;</li> <li>e. jenis kelamin;</li> <li>f. status perkawinan pemohon; dan</li> <li>g. alasan permohonan.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Permohonan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) diajukan secara tertulis oleh yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri.</p> <p>(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bahasa Indonesia dan paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nama lengkap;</li> <li>b. nomor induk kependudukan atau nomor identitas tunggal;</li> <li>c. tempat dan tanggal lahir;</li> <li>d. alamat tempat tinggal;</li> <li>e. pekerjaan;</li> <li>f. jenis kelamin;</li> <li>g. status perkawinan pemohon; dan</li> <li>h. alasan permohonan.</li> </ol>

<p>(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia;</li> <li>b. fotokopi akte perkawinan/buku nikah, kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian, atau kutipan akte kematian isteri/suami pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan sudah kawin yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia;</li> <li>c. fotokopi Surat Perjalanan Republik Indonesia atau Kartu Tanda Penduduk yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia;</li> <li>d. surat keterangan dari perwakilan negara asing bahwa dengan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia pemohon akan menjadi warga negara asing; dan</li> <li>e. pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4X6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.</li> </ol> <p>(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta lampirannya disampaikan kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.</p>	<p>(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. fotokopi kutipan akta kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang dilegalisasi oleh Perwakilan Republik Indonesia;</li> <li>b. fotokopi akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian, atau kutipan akta kematian istri/ suami pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan sudah kawin yang dilegalisasi oleh Perwakilan Republik Indonesia;</li> <li>c. fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Kartu Tanda Penduduk yang sudah diverifikasi oleh Perwakilan Republik Indonesia;</li> <li>d. surat keterangan dari pejabat negara asing bahwa dengan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia pemohon akan menjadi warga negara asing;</li> <li>e. bukti pembayaran uang kehilangan kewarganegaraan sebagai penerimaan negara bukan pajak; dan</li> <li>f. pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4X6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.</li> </ol> <p>(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta lampirannya disampaikan secara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. elektronik melalui sistem informasi; dan</li> <li>b. langsung, kepada Menteri melalui Pejabat.</li> </ol>
<p style="text-align: center;">Pasal 36</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p>
<p>(1) Perwakilan Republik Indonesia memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.</p> <p>(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 belum lengkap, Perwakilan Republik Indonesia mengembalikan kepada pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.</p>	<p>8. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Menteri memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal dokumen diterima secara langsung.</p>

<p>(3) Dalam hal permohonan telah lengkap, Perwakilan Republik Indonesia menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.</p>	
	<p>9. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Menteri setelah menerima permohonan dari Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari memeriksa permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3).</p> <p>(2) Dalam hal permohonan belum lengkap, Menteri mengembalikan permohonan kepada Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima untuk dilengkapi.</p> <p>(3) Dalam hal permohonan telah lengkap, Menteri meneruskan permohonan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 terdapat dokumen persyaratan yang belum lengkap, Menteri memberitahukan kepada pemohon secara elektronik melalui sistem informasi untuk dilengkapi.</p> <p>(2) Pemohon harus melengkapi dokumen persyaratan yang belum lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan disampaikan.</p> <p>(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon tidak melengkapi dokumen persyaratan, permohonan dianggap ditarik kembali.</p> <p>(4) Permohonan yang dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali sesuai dengan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.</p> <p>(5) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 permohonan dinyatakan lengkap, Menteri meneruskan permohonan dengan surat kepada Presiden dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Presiden menetapkan keputusan mengenai kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia.</p> <p>(2) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petikannya disampaikan kepada Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Presiden ditetapkan dan salinannya disampaikan kepada Menteri dan Perwakilan</p>	

<p>Republik Indonesia.</p> <p>(3) Perwakilan Republik Indonesia menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemohon dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Presiden diterima.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>Menteri mengumumkan nama orang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 38 dalam Berita Negara Republik Indonesia.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p> <p style="text-align: center;">Tata Cara Pembatalan Kewarganegaraan Republik Indonesia</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Setiap orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang, dinyatakan batal kewarganegaraannya.</p> <p>(2) Pernyataan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.</p> <p>(3) Berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menyampaikan kepada Presiden untuk membatalkan Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam hal perolehan Kewarganegaraan Republik Indonesia ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden.</p> <p>(4) Dalam hal perolehan Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri, pembatalannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.</p> <p>(5) Keputusan Presiden mengenai pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), petikannya disampaikan kepada yang bersangkutan dan salinannya disampaikan kepada instansi terkait.</p> <p>(6) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tembusannya disampaikan kepada:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Presiden;</p>	



<p>b. Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang yang kehilangan kewarganegaraan;</p> <p>c. Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang yang kehilangan kewarganegaraan; dan</p> <p>d. instansi terkait.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>Bagi Warga Negara Indonesia yang kewarganegaraannya dibatalkan, berlaku ketentuan peraturan perundangundangan mengenai orang asing.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>Menteri mengumumkan nama orang yang kewarganegaraannya dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dalam Berita Negara Republik Indonesia.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Tata Cara Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Warga Negara yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a sampai dengan huruf h Undang-Undang, dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan kepada Presiden melalui Menteri.</p> <p>(2) Tata cara pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 12.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Warga Negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i Undang-Undang, dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.</p> <p>(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara</p>	

tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama lengkap;
- b. alamat tempat tinggal;
- c. tempat dan tanggal lahir;
- d. pekerjaan;
- e. jenis kelamin;
- f. status perkawinan; dan
- g. alasan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilampiri dengan:

- a. fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat lain yang membuktikan tentang kelahiran pemohon yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
- b. fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa pemohon pernah menjadi Warga Negara Indonesia yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
- c. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah, kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian, atau kutipan akte kematian isteri/suami pemohon yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia bagi pemohon yang telah kawin atau cerai;
- d. fotokopi kutipan akte kelahiran anak pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia bagi yang mempunyai anak;
- e. pernyataan tertulis bahwa pemohon setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai Warga Negara

<p>Indonesia dengan tulus dan ikhlas;  f. daftar riwayat hidup pemohon; dan  g. pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4X6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.</p> <p>(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia mengembalikan permohonan kepada pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima untuk dilengkapi.</p> <p>(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap, Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia menyampaikan permohonan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Menteri memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima dari Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.</p> <p>(2) Dalam hal permohonan belum lengkap, Menteri mengembalikan permohonan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima untuk dilengkapi.</p> <p>(3) Dalam hal permohonan telah lengkap, Menteri menetapkan keputusan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima.</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), disampaikan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal ditetapkan dan salinannya disampaikan kepada Presiden dan Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia.</p> <p>(2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), disampaikan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal ditetapkan dan salinannya disampaikan kepada Presiden dan Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(1) Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia.</p> <p>(2) Apabila dengan perolehan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin berlaku ketentuan Pasal 6 Undang-Undang.</p>	
	10. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Warga Negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraannya akibat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang sejak putusya perkawinan dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.</p> <p>(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Warga Negara Indonesia yang kehilangan akibat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang sejak putusya perkawinan dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan kepada Menteri melalui Pejabat secara elektronik melalui sistem informasi atau secara langsung.</p> <p>(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nama lengkap;</li> <li>b. nomor induk kependudukan atau nomor identitas tunggal;</li> </ol>

<ul style="list-style-type: none"> <li>a. nama lengkap;</li> <li>b. alamat tempat tinggal;</li> <li>c. tempat dan tanggal lahir;</li> <li>d. pekerjaan;</li> <li>e. jenis kelamin;</li> <li>f. status perkawinan; dan</li> <li>g. alasan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia.</li> </ul> <p>(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilampiri dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat lain yang membuktikan tentang kelahiran pemohon yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;</li> <li>b. fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa pemohon pernah menjadi Warga Negara Indonesia yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;</li> <li>c. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah, kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian, atau kutipan akte kematian isteri/suami pemohon yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia bagi pemohon yang telah kawin atau cerai;</li> <li>d. fotokopi kutipan akte kelahiran anak pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia bagi yang mempunyai anak;</li> <li>e. pernyataan tertulis bahwa pemohon setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas;</li> <li>f. daftar riwayat hidup pemohon; dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. alamat tempat tinggal;</li> <li>d. tempat dan tanggal lahir;</li> <li>e. pekerjaan;</li> <li>f. jenis kelamin;</li> <li>g. status perkawinan; dan</li> <li>h. alasan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia.</li> </ul> <p>(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. fotokopi kutipan akta kelahiran atau surat lain yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau dilegalisasi Perwakilan Republik Indonesia;</li> <li>b. fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa pemohon pernah menjadi Warga Negara Indonesia yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau dilegalisasi Perwakilan Republik Indonesia;</li> <li>c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat pemberitahuan yang menyatakan identitas kependudukan yang sudah diverifikasi oleh Perwakilan Republik Indonesia;</li> <li>d. fotokopi kutipan akta perkawinan / buku nikah, kutipan akta perceraian, atau kutipan akte kematian istri/suami pemohon yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia bagi pemohon yang telah kawin atau cerai;</li> <li>e. fotokopi kutipan akta kelahiran anak pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau dilegalisasi Perwakilan Republik Indonesia bagi yang mempunyai anak;</li> <li>f. pernyataan tertulis bahwa pemohon setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh- sungguh serta akan menjalankan kewajiban</li> </ul>
---	---

<p>g. pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4X6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.</p>	<p>yang dibebankan negara sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas;</p> <p>g. surat pernyataan melepaskan kewarganegaraan asing dari pemohon yang disetujui oleh pejabat negara asing yang berwenang atau kantor perwakilan negara asing;</p> <p>h. daftar riwayat hidup pemohon;</p> <p>i. bukti pembayaran status kewarganegaraan sebagai penerimaan negara bukan pajak; dan</p> <p>j. pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4X6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.</p>
	<p>11. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.</p> <p>(2) Dalam hal permohonan belum lengkap, Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia mengembalikan permohonan kepada pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima untuk dilengkapi.</p> <p>(3) Dalam hal permohonan telah lengkap, Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia menyampaikan permohonan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>Pejabat memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal dokumen diterima secara langsung.</p>
	<p>12. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>(1) Menteri memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima dari Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.</p> <p>(2) Dalam hal permohonan belum lengkap, Menteri mengembalikan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>(1) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 terdapat dokumen persyaratan yang belum lengkap, Pejabat secara elektronik memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan disampaikan.</p> <p>(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>

<p>permohonan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima untuk dilengkapi.</p> <p>(3) Dalam hal permohonan telah lengkap, Menteri menetapkan keputusan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima.</p>	<p>pemohon tidak melengkapi dokumen persyaratan, permohonan dianggap ditarik kembali.</p> <p>(3) Permohonan yang dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali sesuai dengan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.</p> <p>(4) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 permohonan dinyatakan lengkap, Menteri menetapkan keputusan kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterima.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), disampaikan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal ditetapkan dan salinannya disampaikan kepada Presiden, Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia.</p> <p>(2) Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri diterima.</p>	<p>13. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) Pejabat menyampaikan keputusan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia kepada pemohon secara elektronik.</p> <p>(2) Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga disampaikan kepada Presiden dan instansi terkait dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>(1) Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia.</p> <p>(2) Apabila dengan perolehan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin berlaku ketentuan Pasal 6 Undang-Undang.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>Menteri mengumumkan nama orang yang memperoleh kembali</p>	

<p>Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dan Pasal 53 ayat (1) dalam Berita Negara Republik Indonesia.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Pernyataan Ingin Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>(1) Perempuan atau laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki atau perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia karena menurut hukum negara asal suami atau istri, kewarganegaraan istri atau suami mengikuti kewarganegaraan suami atau istri sebagai akibat perkawinan tersebut.</p> <p>(2) Jika perempuan atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang yang mengajukan pernyataan.</p> <p>(3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinan berlangsung, dibuat dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nama lengkap orang yang mengajukan pernyataan;</li> <li>b. tempat dan tanggal lahir;</li> <li>c. jenis kelamin;</li> <li>d. alamat tempat tinggal;</li> <li>e. pekerjaan;</li> <li>f. kewarganegaraan suami atau istri;</li> <li>g. status perkawinan; dan</li> <li>h. nama lengkap suami atau istri.</li> </ol> <p>(4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. fotokopi kutipan akte kelahiran orang yang mengajukan pernyataan yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;</li> </ol>	



<ul style="list-style-type: none"> <li>b. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah orang yang mengajukan surat pernyataan yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;</li> <li>c. fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa orang yang mengajukan surat pernyataan pernah menjadi Warga Negara Indonesia yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;</li> <li>d. surat pernyataan menolak menjadi warga negara asing dari orang yang mengajukan surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang disetujui oleh pejabat negara asing yang berwenang atau kantor perwakilan negara asing; dan</li> <li>e. pasfoto berwarna terbaru dari orang yang mengajukan surat pernyataan berukuran 4X6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.</li> </ul>	
<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia setelah menerima pernyataan memeriksa kelengkapan persyaratan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.</li> <li>(2) Dalam hal pernyataan belum lengkap, Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia mengembalikan kepada orang yang mengajukan pernyataan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan diterima untuk dilengkapi.</li> <li>(3) Dalam hal pernyataan telah dinyatakan lengkap, Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia menyampaikan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan diterima secara lengkap.</li> </ul>	
<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Menteri memeriksa pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan diterima dari Pejabat atau Perwakilan Republik</li> </ul>	

<p>Indonesia.</p> <p>(2) Dalam hal pernyataan belum lengkap, Menteri mengembalikan pernyataan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan diterima dari Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia untuk dilengkapi.</p>	
	<p>14. Di antara Bab V dan Bab VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab VA sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p style="text-align: center;"><b>BAB VA</b> <b>PENGINTEGRASIAN DATA DAN SISTEM INFORMASI</b> <b>KEWARGANEGARAAN</b></p>
	<p>15. Di antara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 58A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>(1) Dalam hal pernyataan telah lengkap, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan diterima dari Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia, Menteri menetapkan keputusan bahwa orang yang mengajukan pernyataan, tetap sebagai Warga Negara Indonesia.</p> <p>(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia untuk diteruskan kepada orang yang mengajukan pernyataan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri diterima dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 58A</p> <p>(1) Instansi tingkat pusat yang menangani perolehan, kehilangan, pembatalan, dan perolehan kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia melakukan integrasi data dan dokumen kewarganegaraan yang dikoordinasikan oleh Menteri.</p> <p>(2) Pengintegrasian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam sistem informasi kewarganegaraan yang dikelola oleh Menteri.</p> <p>(3) Sistem informasi kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakses oleh instansi terkait.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengintegrasian data dan sistem informasi kewarganegaraan diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.</p>
<p style="text-align: center;"><b>BAB VI</b> <b>KETENTUAN LAIN</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(1) Anak yang berkewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang, wajib didaftarkan oleh orang tua atau walinya pada kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.</p>	

<p>(2) Kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat dalam register dan mengeluarkan bukti pendaftaran untuk memperoleh fasilitas sebagai Warga Negara Indonesia yang berkewarganegaraan ganda.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>(1) Anak yang berkewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.</p> <p>(2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia, pernyataan disampaikan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.</p> <p>(3) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nama lengkap anak yang menyampaikan pernyataan;</li> <li>b. tempat dan tanggal lahir;</li> <li>c. jenis kelamin;</li> <li>d. alamat tempat tinggal;</li> <li>e. nama lengkap orang tua;</li> <li>f. status perkawinan orang tua; dan</li> <li>g. kewarganegaraan orang tua.</li> </ol> <p>(4) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilampiri dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. fotokopi kutipan akte kelahiran anak yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;</li> <li>b. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah orang tua yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;</li> <li>c. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah anak yang belum</li> </ol>	

<p>berusia 18 (delapan belas) tahun tetapi sudah kawin yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;</p> <p>d. fotokopi paspor Republik Indonesia dan/atau paspor asing atau surat lainnya yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;</p> <p>e. surat pernyataan melepaskan kewarganegaraan asing dari anak yang mengajukan surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang disetujui oleh pejabat negara asing yang berwenang atau kantor perwakilan negara asing; dan</p> <p>f. pasfoto berwarna terbaru dari anak yang menyampaikan pernyataan berukuran 4X6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>(1) Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia memeriksa kelengkapan pernyataan memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan diterima.</p> <p>(2) Dalam hal pernyataan belum lengkap, Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia mengembalikan pernyataan kepada anak yang menyampaikan pernyataan memilih dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan diterima untuk dilengkapi.</p> <p>(3) Dalam hal pernyataan telah lengkap, Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia menyampaikan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan diterima secara lengkap.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>(1) Menteri memeriksa pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pernyataan dari Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia.</p> <p>(2) Dalam hal pernyataan belum lengkap, Menteri mengembalikan pernyataan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia dalam</p>	

<p>waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan diterima untuk dilengkapi.</p> <p>(3) Dalam hal pernyataan telah lengkap, Menteri menetapkan keputusan bahwa anak yang bersangkutan Warga Negara Indonesia.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>(1) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) disampaikan kepada pemohon melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan dan salinannya disampaikan kepada Presiden dan Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia.</p> <p>(2) Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia memberitahukan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anak yang mengajukan pernyataan memilih dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri diterima.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(1) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) juga memuat kewajiban anak untuk menyerahkan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia tanda terima pengembalian dokumen atau surat-surat keimigrasian negara asing dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh anak yang menyampaikan pernyataan memilih.</p> <p>(2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) disampaikan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia kepada anak yang menyampaikan pernyataan memilih setelah anak tersebut menyerahkan tanda terima pengembalian dokumen atau surat-surat keimigrasian negara asing kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia.</p> <p>(3) Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia melaporkan kepada Menteri tentang penyerahan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penyerahan Keputusan Menteri kepada anak yang menyampaikan pernyataan memilih.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 65</p>	

<p>(1) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) memilih kewarganegaraan asing atau tidak memilih salah satu kewarganegaraan, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai orang asing.</p> <p>(2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembalikan keputusan, dokumen, atau surat lain yang membuktikan identitas anak sebagai Warga Negara Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk memilih berakhir.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>Formulir yang digunakan untuk:</p> <p>a. pewarganegaraan;</p> <p>b. memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak angkat;</p> <p>c. kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia;</p> <p>d. memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia;</p> <p>e. menyampaikan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia;</p> <p>f. pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda; dan</p> <p>g. memilih kewarganegaraan bagi anak yang berkewarganegaraan ganda, diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	
	<p>16. Di antara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 67A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>(1) Perempuan asing yang kawin dengan laki-laki Warga Negara Indonesia dalam waktu 1 (satu) tahun sebelum Undang-Undang berlaku, diberi kesempatan untuk menyatakan keterangan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.</p> <p>(2) Kesempatan untuk menyatakan keterangan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah perkawinan.</p> <p>(3) Proses penyelesaian perolehan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Pejabat atau</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 67A</p> <p>Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, anak yang belum mendaftar atau sudah mendaftar tetapi belum memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A harus mengajukan permohonan Pewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.</p>

Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang menyampaikan pernyataan dan dilakukan berdasarkan Undang-Undang.	
<b>BAB VIII KETENTUAN PENUTUP</b>	
<p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:</p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1958 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tanggal 23 Desember 1958 dan peraturan pelaksanaannya; dan</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tanggal 13 April 1976 dan peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>
<p>Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 2 Januari 2007 <b>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</b> ttd <b>DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO</b></p>	<p>Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 31 Mei 2022 <b>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</b> ttd <b>JOKO WIDODO</b></p>
<p>Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 2 Januari 2007 <b>MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA AD INTERIM</b> ttd</p>	<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2022 <b>MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA</b> ttd <b>YASONNA H. LAOLY</b></p>

YUSRIL IHZA MAHENDRA	
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 2	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 21